TRIBUN PONTIANAK

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2017	Hal.: 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Dinas SP3AMD Monitoring Keuangan Desa

KAYONG UTARA, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (SP3AMD) melakukan monitoring Pengelolaan Keuangan Desa untuk mempercepat pencairan dana desa tahap II.

"BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mendorong pemerintah daerah agar segera melakukan kegiatan monitoring, untuk mendorong percepatan pencairan dana tahap II. Sekaligus juga banyak permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti," kata Kabid Pemdes, Andri Chandra, Selasa (22/8).

> **Khusus desa yang masih ada masalah, akan kita surati**
>
> **Andri Chandra**
> Kabid Pemdes Dinas SP3AMD KKU

Menurutnya monitoring sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan. Antara lain Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, dan saat ini di Kecamatan Sukadana. "Kita juga mengundang OPD terkait, pihak kecamatan, Inspektorat, pendamping desa dan Badan Keuangan Daerah, dalam kegiatan monitoring ini," jelasnya.

Dalam monitoring tersebut, dia mengatakan ada beberapa hal yang akan dievaluasi. Antara lain evaluasi penyerapan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD), pembukuan keuangan, dan administrasi desa yang berkaitan penyelenggaraan pemerintahan desa.

"Ada beberapa hal terkait monitoring. Apa-apa saja yang kita *review*. Yang pertama itu kita akan melihat masalah pajak. Kita akan coba melihat pajak dari tahun 2015, dan tahun 2017 berjalan ini sampai mana pembayaran pajak," jelasnya.

Nantinya hasil monitoring akan dilaporkan kepada Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid, agar ditindaklanjuti. "Khusus desa yang masih ada masalah, akan kita surati. Nanti dari pihak kecamatan yang akan mem*follow up* apa-apa saja yang harus dilengkapi desa," pungkasnya. **(fau)**